



Newsletter KADIN INDONESIA

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KADIN INDONESIA

Empat Quick Win Kadin



INSIDE +

- Bertumbuh 8% Sebuah Keharusan

- Empat Program Quick Win Kadin dan Kontribusinya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 8%

SAMBUTAN KETUA UMUM KADIN INDONESIA



Sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung program-program prioritas pemerintah. Melalui semangat "Indonesia Incorporated" dan gotong royong, kami di Kadin Indonesia terus berupaya menghadirkan solusi nyata yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

Dalam rangka mendukung visi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kadin Indonesia telah merancang dan meluncurkan empat prototipe *quick win* yang bertujuan untuk mempercepat realisasi program-program strategis. Keempat program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis (PKG), pembangunan tiga juta rumah layak huni, serta program tenaga kerja migran. Kami percaya bahwa melalui sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, program ini dapat berjalan dengan optimal dan berkelanjutan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi langkah nyata dalam mendukung pemenuhan gizi bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya Satuan Pelayanan

Pemenuhan Gizi (SPPG) Gotong Royong, kami berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kadin Indonesia bersama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) akan terus mengawal implementasi program ini agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Selain itu, dalam sektor perumahan, kami turut berperan dalam mendukung program pembangunan tiga juta rumah layak huni per tahun. Melalui program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Gotong Royong, Kadin Indonesia berkomitmen untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan hunian yang lebih layak. Kolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi kunci utama dalam mewujudkan program ini secara efektif.

Dalam bidang kesehatan, kami juga berkontribusi melalui program Klinik Gotong Royong yang menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis (PKG). Kadin Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan bahwa layanan kesehatan dasar dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Kami berharap program ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan kesehatan nasional.

Selanjutnya, Kadin Indonesia juga berfokus pada peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui program Pekerja Migran Gotong Royong. Kolaborasi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menjadi upaya konkret dalam menyiapkan tenaga kerja Indonesia yang terampil dan kompetitif di pasar internasional. Kami ingin memastikan bahwa pekerja migran kita mendapatkan akses terhadap pelatihan yang memadai serta perlindungan yang optimal.

Keempat program *quick win* ini tidak hanya menjadi inisiatif Kadin Indonesia semata, tetapi juga bentuk nyata dari komitmen kami dalam mendukung kebijakan pemerintah. Dengan pendekatan gotong royong dan kerja sama lintas sektor, kami yakin bahwa program-program ini dapat berjalan dengan efektif dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.

Kami juga menyadari pentingnya evaluasi dan monitoring dalam setiap tahapan implementasi program. Oleh karena itu, Kadin Indonesia akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa seluruh inisiatif yang telah dirancang dapat berjalan sesuai dengan harapan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan program-program ini.

Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik dari sektor pemerintah, swasta, maupun masyarakat, untuk bersama-sama mendukung dan berkontribusi dalam menyelesaikan program *quick win* ini. Keberhasilan program ini bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi merupakan hasil dari kolaborasi yang erat antara semua elemen bangsa.

Akhir kata, saya berharap agar semangat gotong royong dan kolaborasi ini dapat terus mengakar dalam setiap langkah kita membangun Indonesia. Mari kita bergerak bersama, berkontribusi nyata, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negeri tercinta. Kadin Indonesia akan terus berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Ketua Umum Kadin Indonesia,
Anindya Novyan Bakrie



- Penerbit: **Kadin Communication Office**
- Penanggung jawab: **Kadin Communication Office**
- Dewan Redaksi: **Abdul Aziz, Arita Gloria Zulkifli, Taufik Zulkarnaen, Reiner Rekado**

- Alamat Redaksi: **Menara Kadin Indonesia Lantai 29, Jln HR Rasuna Said, Blok X-5, Kav No 2-3**

Oleh: **Primus Dorimulu**
(Chief Kadin Communication Office)



Bertumbuh 8% Sebuah Keharusan

Lupakan mimpi Indonesia Emas 2045 jika laju pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berkisar 5-5,5%. Tanpa meraih pertumbuhan ekonomi 8% selama era puncak bonus demografi, Indonesia akan terjebak dalam middle income trap. Pengalaman negara maju mestinya menjadi cerminan. Semua negara maju mencetak pertumbuhan ekonomi 8-10% selama mereka berada di puncak bonus demografi.

Bonus demografi yang sudah dicapai Indonesia sejak tahun 2010, akan mencapai puncaknya pada tahun 2030 hingga 2040. Dalam sepuluh tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 5%, tentu dengan berbagai alasan dan penjelasan. Target pertumbuhan 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto mungkin saja tidak terwujud dalam lima tahun ke depan. Tapi, tanpa sebuah target yang tinggi, yang ambisius, pertumbuhan ekonomi di atas 5% sulit dicapai.

“Kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026-2029 bisa naik perlahan dari 5,5% ke 7%, itu sudah sangat bagus,” kata seorang ekonom. Target pertumbuhan 8% bagaikan sebuah palu godam yang menghentak semua pihak, khususnya pemerintah dan pelaku usaha, untuk mengerahkan semua kemampuan dan sumber daya yang ada untuk melakukan akselerasi.

Dengan mencari sumber pertumbuhan baru dan memperkuat fondasi ekonomi, setelah lima tahun ke depan ekonomi diharapkan bisa bertumbuh di atas 8%. Periode setelah 2029 adalah periode sangat menentukan karena selama 2030-2040, Indonesia menikmati puncak bonus demografi. Dalam konteks ini, target pertumbuhan yang ditetapkan Presiden Prabowo dinilai tepat, penting, dan relevan.

Jumlah penduduk Indonesia usia produktif, 15-64 tahun, demikian sensus penduduk yang dilakukan BPS tahun 2020, mencapai 70,72% atau 191 juta dari total populasi penduduk yang sebesar 270,20 juta. Bonus demografi sudah dicapai Indonesia sejak 2010, ketika persentase usia produktif tercatat 64,68% dari total penduduk yang pada tahun itu mencapai 237,641 juta.

Bonus demografi hanya terjadi satu kali dalam perjalanan sebuah negara. Oleh karena itu, ekonomi harus dikelola dengan baik ketika negara sedang

menikmati bonus demografi. Hanya dengan pengelolaan yang baik, bonus demografi menjadi anugerah. Sebaliknya, negara yang tidak dikelola dengan baik akan menjadi bencana. Banyak contoh negara menengah yang terjebak *middle income trap* karena tidak mampu memacu pertumbuhan ekonominya.

Untuk masuk kategori negara maju, Indonesia yang tahun ini berada di *upper middle-income countries* dengan PDB per kapita sekitar US\$ 5.000 harus mencapai PDB per kapita minimal US\$ 13.800. China dengan PDB per kapita sekitar US\$ 13.306 baru di ambang batas bawah negara maju. Tapi, level PDB per kapita China sudah 2,5 kali Indonesia.

Sebagaimana ditunjukkan oleh semua negara maju, saat menikmati bonus demografi, laju pertumbuhan ekonomi mereka di atas 7%. China, misalnya, menorehkan laju pertumbuhan ekonomi 7-11% selama tahun 1980 hingga paruh pertama era 2010-an. Lebih dari 30 tahun, pertumbuhan ekonomi China menakjubkan.

Sejak reformasi ekonomi yang digulirkan Deng Xiaoping tahun 1978, pertumbuhan ekonomi China melesat. Pada dekade 1980-an, rata-rata pertumbuhan ekonomi China sekitar 9,3% setahun. Pada era 1990-an, pertumbuhan ekonomi negeri Tirai Bambu itu sekitar 10% per tahun. Pertumbuhan pesat terjadi di semua bidang, khususnya sektor industri manufaktur, teknologi, dan pertanian. China mengekspor berbagai jenis produk ke berbagai negara dan mencatat surplus neraca perdagangan dengan semua negara.

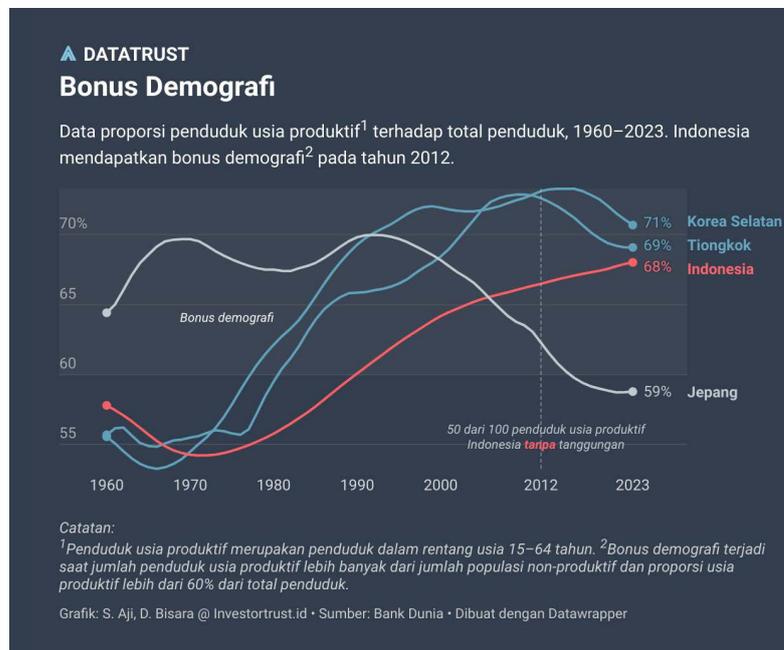
Meski mempertahankan sistem politik yang berada di bawah satu komando, Partai Komunis, China menerapkan sistem ekonomi pasar. Sejak 1978, China memberikan karpet merah kepada investor asing. Dengan sistem politik "*one command, one policy, and one direction*" yang dipadukan dengan sistem ekonomi pasar, laju pertumbuhan ekonomi China mencapai dua digit saat negeri Tirai Bambu itu menikmati puncak banus demografi.

Pada dekade 2000-an, laju pertumbuhan ekonomi China rata-rata 10-11% per tahun

dan mencapai puncaknya pada tahun 2007 dengan laju pertumbuhan 14,2%. Pada paruh pertama dekade 2010-an, laju pertumbuhan ekonomi China sekitar 7-9%. Sejak pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi China menurun.

Jepang mengalami puncak bonus demografi tahun 1950-1973 dengan laju pertumbuhan ekonomi sekitar 9,7% per tahun. Sedangkan ekonomi Korsel bertumbuh pesat selama 1960-1990 dengan laju pertumbuhan 8-10% per tahun. Kemajuan kedua negara ini didorong oleh industri manufaktur.

Tidak ada kata yang lebih pas buat langkah Kadin Indonesia dalam mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto selain kata "*all out*". Sebagaimana ditegaskan Ketua Umum



Kadin Anindya Novyan Bakrie, Kadin sebagai mitra pemerintah sudah menancapkan tekad untuk memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden, delapan misi Asta Cita untuk mencapai visi bersama "Indonesia Emas 2045".

Lima dari delapan poin Asta Cita menjadi perhatian utama Kadin. Kelima poin itu adalah pertama, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Kedua, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.



Kesibukan kegiatan ekspor impor di Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priok, Jakarta.

(Foto: Investortrust/Dicki Antariksa)

Ketiga, memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Keempat, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Kelima, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Presiden Prabowo pun sudah menggulirkan sejumlah langkah konkret untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Empat dari sejumlah program Presiden merupakan *quick win* atau program yang harus cepat direalisasikan dan menunjukkan hasil.

Keempat program *quick win* itu adalah realisasi program makan bergizi gratis (MBG), program 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG), dan penyiapan tenaga terampil untuk memenuhi permintaan luar negeri. Kadin terlibat penuh dalam empat program ini dan menyiapkan prototipe kegiatan sebagai *showcase*. Dengan melihat program contoh yang dibuat Kadin, pengusaha anggota Kadin maupun yang belum menjadi anggota Kadin bisa mendapatkan contoh yang bisa ditiru.

Keempat program yang dijadikan *quick win* ini dinilai mampu mewujudkan laju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mengakselerasi laju

pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Program MBG tidak hanya mempersiapkan generasi sehat dan cerdas, melainkan juga menggerakkan ekonomi di setiap wilayah, perdesaan dan perkotaan. Bahan pangan untuk MBG harus berasal dari setiap daerah dan tenaga yang terlibat sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berasal dari daerah. SPPG inilah pengelola dapur MBG.

Program 3 juta rumah diyakini dapat menggerakkan ekonomi lokal. Tidak semua rumah baru dan sama sekali bukan gratis. Perbaikan rumah juga masuk dalam program 3 juta rumah. Karena rumah yang ditujukan bagi MBR, harga rumah dibuat semurah mungkin lewat berbagai pemotongan biaya. Melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), MBR dapat menikmati uang muka yang lebih terjangkau, sekitar 1% dari harga rumah.

Selain itu, pemerintah memberikan subsidi bunga KPR maksimal hanya 5% dan angsuran bulanan yang lebih ringan. Ada pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), penghapusan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG), retribusi PBG, yang sebelumnya dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pembebasan biaya premi asuransi, dan tenor KPR lebih panjang hingga 30 tahun.

Pembangunan rumah berdampak luas dan efektif dalam menggerakkan perekonomian. Setiap pembangunan MBR, paling tidak terdapat lima-enam tenaga kerja terlibat. Ada sekitar 185

mata barang yang dibutuhkan sebuah rumah, di antaranya batu bata, pasir, kayu, dan genteng yang bisa dipenuhi oleh masing-masing wilayah.

Untuk program PKG, Kadin membantu menyediakan fasilitas pemeriksaan, menyediakan pendanaan untuk pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu, membantu pengadaan alat kesehatan, obat-obatan, atau fasilitas pendukung, berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, BPJS, atau rumah sakit untuk memperluas cakupan program, memberikan insentif kepada karyawannya untuk pemeriksaan kesehatan gratis secara berkala. Kadin dapat membantu layanan digital untuk mendukung akses layanan kesehatan gratis.

Untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, pemerintah membentuk sebuah kementerian khusus yang menangani pekerja migran dengan nama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Dalam dua tahun terakhir, remitansi atau pengiriman uang dari pekerja migran Indonesia cukup signifikan, yakni US\$ 14,2 miliar atau setara Rp 235 triliun tahun 2023 dan US\$ 11,6 miliar atau US\$ 200 triliun tahun 2024.

Jika dikelola dengan baik, potensi remitansi bisa di atas US\$ 100 miliar setahun dalam lima tahun ke depan. Remitansi India sudah mencapai US\$ 130 miliar. Pada tahun 2024, pekerja migran Indonesia 4,6 juta, sedang Filipina sudah mencapai 6 juta, dan India 17,8 juta. Namun, yang menjadi persoalan Indonesia adalah jumlah pekerja migran ilegal yang diperkirakan mencapai 5 juta, keterampilan pekerja migran yang rendah, kemampuan pekerja migran dalam komunikasi yang tidak memadai, dan tingginya *human trafficking* atau perdagangan manusia.

Kadin kini terlibat penuh dalam mempersiapkan calon pekerja migran lewat perbaikan pengelolaan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dengan target utama mengubah pekerja migran ilegal menjadi pekerja migran legal, pekerja migran yang tidak terampil menjadi pekerja migran terampil, pekerja migran yang tidak atau terlindungi menjadi pekerja migran yang mendapatkan perlindungan penuh dari negara, dan menggenolkan *human trafficking*.

Kadin akan membangun balai pelatihan sebagai contoh untuk mendidik calon pekerja

migran yang terampil, memahami tata krama, dan mengerti bahasa negara tujuan. Saat ini, 57% pekerja migran legal adalah pekerja domestik, 68% lulusan SD dan SMP, serta 66% berasal dari daerah miskin.

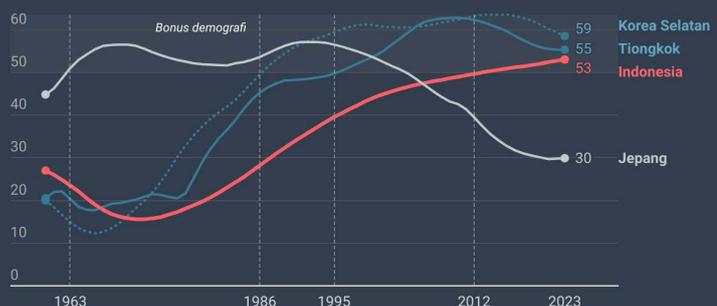
Lewat balai pelatihan, P3MI dapat mempersiapkan calon pekerja migran menjadi perawat rumah sakit, sopir, *babysitter*, dan *caregiver* untuk lansia. Permintaan dari Timur Tengah, Jepang, Eropa, dan Hong Kong untuk jasa perawat rumah sakit dan *caregiver* sangat besar.

Selain empat program ini, Presiden Prabowo menggulirkan sejumlah program untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, yakni pembangunan pertanian dan pangan, pembangunan ekonomi biru atau kelautan dan

▲ DATATRUST

Indonesia Nikmati Bonus Demografi Sejak 2012

Data jumlah penduduk usia produktif tanpa tanggungan untuk setiap 100 penduduk usia produktif¹, 1960–2023. Pada tahun 2012, 50 dari 100 penduduk usia produktif di Indonesia tidak memiliki tanggungan, menandai mulainya periode bonus demografi².



Catatan:

¹Penduduk usia produktif merupakan penduduk dalam rentang usia 15–64 tahun. ²Bonus demografi terjadi saat jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) lebih besar dibanding usia nonproduktif dan proporsi penduduk usia produktif lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Indonesia.

Grafik: S. Aji, D. Bisara @ Investortrust.id • Sumber: Bank Dunia, UI • Dibuat dengan Datawrapper

perikanan, hilirisasi dan industri manufaktur, teknologi digital dan *artificial intelligence* (AI), dan infrastruktur. Meski bukan fokus utama, infrastruktur dasar (air bersih), infrastruktur pertanian, dan infrastruktur telekomunikasi tetap dibangun.

Hilirisasi, industri manufaktur, ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi digital, properti, kesehatan, pertanian dan pangan, dan ekonomi digital hingga AI merupakan sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia. Meski sudah memasuki era digital dan AI, dunia usaha mulai level korporasi hingga UMKM, tetap harus memperhatikan sektor usaha padat karya. Hanya dengan itu, ekonomi tidak hanya bertumbuh 8%, melainkan juga inklusif, yakni dinikmati dan dirasakan oleh seluruh warga bangsa. ●

Empat Quick Win

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyatakan, Kadin Indonesia mendukung program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan mendesain prototipe empat quick win, yang berlandaskan semangat "Indonesia Incorporated" dan gotong royong. Prototipe itu diluncurkan pada acara Buka Puasa Bersama bertajuk "Bersatu dalam Kebaikan" yang digelar di Jakarta Convention Center, Jumat (14/3/2025).

Empat program *quick win* yang diinisiasi Kadin Indonesia tersebut adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis (PKG), pembangunan 3 juta rumah layak huni, serta program tenaga kerja migran. Desain prototipe keempat *quick win* tersebut ditargetkan rampung sebelum peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80 pada 17 Agustus 2025.

Anindya Bakrie menegaskan bahwa inisiatif mendesain prototipe *quick win* menjadi bukti bahwa Kadin Indonesia bergerak cepat serta berbuat lebih banyak ketimbang berbicara. "Pelaksanaannya pun

nanti akan dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai pengusaha pejuang dan pengusaha pembangunan, menghormati etika usaha, bersemangat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai patriotisme," ucap Anin.

Selanjutnya, Kadin Indonesia juga siap bekerja sama lebih erat dengan seluruh kementerian dan lembaga, guna mempercepat, mengefisienkan, dan mensukseskan seluruh program pemerintah, khususnya yang menjadi prioritas Presiden, agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Rincian prototipe keempat *quick win* tersebut adalah sebagai berikut:

1 SPPG Gotong Royong

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan 2,6%, menciptakan 1,5 juta pekerja di SPPG, serta menambah pertumbuhan ekonomi sebesar 1,99%. Program MBG awalnya mendapat alokasi dana APBN sebesar Rp 71 triliun, kemudian ditambah lagi sebesar Rp 100 triliun. Tambahan dana tersebut berasal dari kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto yang bernilai total sekitar Rp 750 triliun.

Untuk program MBG, Kadin Indonesia berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) akan

membangun dan mengoperasikan pilot percontohan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sesuai standar BGN, yakni SPPG Gotong Royong.

Lewat program ini, Kadin Indonesia akan membangun 19 Pilot SPPG MBG yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara. Program ini ditargetkan mencakup sekitar 628 sekolah dan 64.000 siswa/siswi penerima bantuan. Program tahap pertama ini ditargetkan rampung pada 17 Agustus 2025.

Dana pengembangan SPPG Gotong Royong akan diperoleh dari kemitraan mandiri melalui dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) anggota Kadin. Rencananya, Kadin akan membangun total 1.000 SPPG Gotong Royong.

Untuk *capacity building*, Kadin Indonesia bekerja sama dengan BGN memberikan pelatihan bagi UMKM di setiap Kadin Daerah tentang *best practice* tata cara pengelolaan SPPG yang sesuai standar BGN.

Selain itu, Kadin Daerah siap memasok bahan bakunya. "Teman-teman Kadin Daerah bisa berpartisipasi. Kita sudah bertemu Menteri Pertanian, kita terbuka lebar untuk berpartisipasi di 8 komoditas yang dibutuhkan. Kadin dan Kementerian Pertanian sudah



(Foto 1) Perumahan di Karawang yang tumbuh sejak perluasan pembangunan infrastruktur seperti Jalan Tol Cikampek II dan Kereta Cepat Whoosh (Foto: Investortrust/Mohammad Defrizal). (Foto 2) Program Makan Bergizi Gratis diujicoba di sebuah sekolah dasar di Jakarta (Foto: BPMI Setpres). (Foto 3) Salah satu program Presiden Prabowo adalah Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang telah dibuka di Puskesmas Giater, Tangerang Selatan. (Foto: Investortrust/Mohammad Defrizal). (Foto 4) Para pekerja migran yang belum terlindungi menjadi program prioritas bagi pemerintah dan Kadin Indonesia (Foto: Ist.).

menandatangani MoU untuk program ini,” tutur Anindyia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan, untuk bisa melayani 82,9 juta penerima manfaat MBG, dibutuhkan 30.000 SPPG yang tersebar di berbagai penjurur Tanah Air. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.542 SPPG dibangun menggunakan APBN, sisanya 28.458 unit dibangun dengan kemitraan.

Untuk itu, BGN merangkul sejumlah instansi dan organisasi. Di antaranya: TNI ditargetkan bisa membangun 2.000 SPPG, Polri 500 SPPG, Badan Intelijen Negara (BIN)

1.000 SPPG, Kadin Indonesia 1.000 SPPG, Nahdlatul Ulama (NU) 1.000 SPPG, dan Muhammadiyah 500 SPPG. Hingga Senin (17/3/2025), ada 1.100 SPPG yang sudah beroperasi.

Dadan menilai Kadin Indonesia punya potensi luar biasa di daerah dalam mendorong pembangunan dan pengembangan infrastruktur program MBG. Selain infrastruktur, BGN meminta anggota Kadin menghasilkan produk pangan lokal, meningkatkan produktivitas daerah, dan menumbuhkan UMKM.

BGN saat ini sedang mengadakan program pelatihan bagi 2.000 SDM pelaksana MBG yang akan tuntas

pada akhir Juli dan siap diterjunkan mulai September.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan, program MBG telah menyerap anggaran sebesar Rp 710,5 miliar dengan menasar lebih dari 2 juta penerima hingga 12 Maret 2025. Pada awalnya, anggaran program MBG ditetapkan sebesar Rp 71 triliun dengan target 17,9 juta orang penerima, terdiri atas 15,5 juta anak sekolah serta 2,4 juta orang ibu hamil/menyusui dan balita. Dalam perkembangannya, Presiden Prabowo memutuskan target penerima dinaikkan menjadi 82,9 juta orang

dengan anggaran Rp 171 triliun.

Dengan anggaran tahun 2025 senilai Rp 71 triliun, sampai April, MBG akan melayani 3 juta penerima. Lalu, April sampai Agustus 6 juta penerima, Agustus sampai September 15 juta penerima, serta Desember ditargetkan 17,5 juta penerima.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, program MBG diaudit tiga bulan sekali untuk mengevaluasi tingkat penyerapan dan pelaksanaannya, serta mendeteksi berbagai kekurangan yang perlu diperbaiki.

Sementara itu, dalam konteks bahan baku untuk MBG, Indonesia saat ini surplus 200.000 ton telur dan 600.000 ton daging ayam, karena hanya 30% masyarakat yang mampu membeli. BGN akan menyerap kelebihan itu untuk MBG.

Produksi susu lokal baru memenuhi kebutuhan 20%, 80% diimpor. Pengusaha wajib menyerap susu peternak lokal. Mereka yang melanggar, izin impor dan kuota impornya dibekukan. Pemerintah menargetkan impor dua juta sapi indukan ke Indonesia. Ada 167 perusahaan yang berkomitmen mendatangkan sapi, lalu bermitra dengan peternak lokal.

2

Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Gotong Royong

Lewat program *quick win* ini, Kadin Indonesia berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk membantu terwujudnya program 3 juta rumah per tahun. Dalam kerja sama ini, akan dibentuk prototipe kerja sama pemanfaatan lahan BUMN untuk pembangunan superblok perumahan dan kawasan permukiman di kawasan Industri dan pelabuhan. Prototipe pertama ini akan dibangun di kawasan industri PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Dalam program ini Kadin Indonesia juga akan merenovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

melalui program CSR Kadin dengan target 500 rumah yang akan dilaksanakan dengan target sebelum 17 Agustus 2025.

Program Renovasi RTLH Gotong Royong pertama akan digelar di lima provinsi prioritas, yaitu Kota Jakarta sebanyak 200 Unit, Provinsi Banten 100 Unit, Provinsi Jawa Barat 100 Unit, Provinsi NTT 50 Unit, serta Provinsi Bangka-Belitung 50 unit.

Pemerintah akan menambah kuota rumah subsidi dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebanyak 220

ribu unit (dari semula 200 ribu), sehingga menjadi 420 ribu unit pada 2025. Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait akan menambah target penyaluran KPR skema FLPP sebanyak 800.000 unit rumah pada 2025.

Kementerian PKP juga akan menyiapkan minimal 100.000 rumah komersial dengan skema non-FLPP. Model pembiayaan yang tepat masih dibahas. Ihwal ini dibahas Menteri PKP Maruarar Sirait dalam pertemuan dengan dua pendiri Grup Sinar Mas Franky Widjaja dan Chairman



(Atas) Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N. Bakrie saat memberikan cenderamata kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sesuai audiensi Kadin Indonesia di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (6/2/2025) (Foto: Investortrust/Dicki Antariksa). (Bawah) Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N. Bakrie didampingi Wakil Ketua Umum (WКУ) Bidang Kelautan dan Perikanan Kadin Indonesia Yugi Prayanto (kanan) menerima cenderamata dari Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono usai audiensi Kadin Indonesia dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Selasa (18/2/2025) (Foto: Investortrust/Primus Dorimulu).



(Atas) Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie dan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding berfoto bersama saat audiensi Ketua Umum dan pengurus Kadin di Gedung BP2MI di Jakarta, Senin, (17/2/2025) (Foto: Investortrust/Mohammad Defrizal). (Bawah) Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie berbincang dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait sebelum dimulainya acara FGD Kadin Bidang PKPT dengan tema: "Driving Sustainability in Real Estate Sector" di Menara Kadin, Jakarta, Kamis, (6/2/2025) (Foto: Dok. Kadin Indonesia).

Lippo Grup James Riady di Karawaci, Tangerang, Sabtu (15/3/2025).

Sementara itu, rumusan baru skema FLPP akan rampung pada akhir Maret 2025. Selama ini, perbandingan sumber pembiayaan FLPP adalah 75% APBN dan 25% perbankan (75:25), dan rasio akan diubah menjadi 50:50.

Dengan kuota FLPP 220 ribu unit, alokasi dana APBN Rp 28,17 triliun. Jika dinaikkan menjadi 500.000 rumah dengan rasio 50:50, total anggaran APBN diusulkan Rp 49,22 triliun.

3 Klinik Gotong Royong

Dalam program *quick win* ketiga, Kadin Indonesia berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan untuk penyediaan fasilitas Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Program ini mencakup tempat dan fasilitas dasar kesehatan, antara lain berupa ruangan pemeriksaan dan pengambilan sample darah, bekerja sama dengan Kadin Daerah di setiap provinsi.

Dalam program ini akan diupayakan integrasi data *medical check up* (MCU) dengan PKG, lewat

penyelarasan dan pengintegrasian data bagi masyarakat yang sudah mendapatkan fasilitas MCU dari perusahaan tempat bekerja di aplikasi Satu Sehat, termasuk yang tidak membutuhkan fasilitas PKG dari pemerintah.

Berikutnya akan disusun *white paper* terkait kontribusi program utama Program Kesehatan Pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 8%.

4 Pekerja Migran Gotong Royong

Lewat program *quick win* keempat, Kadin Indonesia berkolaborasi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) melaksanakan program pemenuhan *skilled worker* pasar kerja luar negeri.

Di sektor ketenagakerjaan, MoU Kadin dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah untuk penyediaan pelatihan tenaga kerja terampil, seperti tenaga perawat.

Langkah pertama adalah membantu diseminasi atau penyebarluasan informasi secara masif dan terstruktur ke masyarakat guna meningkatkan akses terhadap peluang kerja *skilled worker* di luar negeri.

Berikutnya penyelenggaraan Tata Kelola Rekrutmen calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui sistem yang terintegrasi dengan sistem KP2MI sehingga dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga migran *skilled worker*.

Saat ini tercatat ada 5 juta pekerja migran yang tersebar di berbagai negara dengan devisa yang mereka hasilkan sebanyak Rp 225 triliun.

Program ini dilakukan dengan membangun koperasi baru atau merevitalisasi koperasi yang sudah ada. Ada juga 64.000 Gapoktan (gabungan kelompok tani) yang siap berubah menjadi koperasi.

Dengan asumsi satu Kopdes dikelola 3 orang, maka dibutuhkan 210 ribu pengurus koperasi yang harus dipersiapkan dan dibina. ●



PENGUKUHAN PENGURUS KADIN INDONESIA

MASA BAKTI 2024 - 2029



Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan sambutan pada Pengukuhan Pengurus Kadin Indonesia Masa Bakti 2024-2029, di JCC Jakarta, Jumat (13/3/2025). (Foto: Investortrust/Mohammad Defrizal)

Kadin Bersinergi untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi 8%



Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan sambutan pada Pengukuhan Pengurus Kadin Indonesia Masa Bakti 2024-2029, di JCC Jakarta, Jumat (13/3/2025). (Foto: Investortrust/Mohammad Defrizal)



Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N. Bakrie dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memperlihatkan Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani pada acara Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama sekaligus Pengukuhan Pengurus Kadin Indonesia Masa Bakti 2024-2029, di JCC Jakarta, Jumat (13/3/2025). (Foto: Investortrust)

Memorandum of Understanding

Sebagai implementasi konkret untuk pelaksanaan program *quick win*, Kadin Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) dengan sejumlah kementerian dan lembaga. MoU tersebut meliputi:

1. MoU Kadin Indonesia dan Kementerian Kesehatan

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sepakat menjalin kerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kerja sama ditandai dengan ditandatanganinya nota kesepahaman atau *memorandum of understanding* (MoU) tentang dukungan penyelenggaraan program prioritas pemerintah

bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Kerja sama Kadin dan Kemenkes meliputi: (1) Penguatan industri sektor kesehatan, (2) Dukungan dan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis, (3) Penuntasan TBC dan penyakit menular lainnya, (4) Dukungan penanggulangan masalah gizi, (5) Peningkatan kapasitas SDM kesehatan, (6) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah, (7) Pertukaran dan pemanfaatan data serta integrasi sistem informasi kesehatan.

MoU ditujukan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesehatan, penanggulangan penyakit menular, hingga penanggulangan masalah gizi.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengapresiasi program Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang bisa menjangkau 265 juta orang.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengajak Kadin untuk membahas *roadmap* industri kesehatan. Kadin menyambut baik, karena belum terlalu banyak kesempatan yang diberikan kepada swasta untuk bergelut di industri kesehatan. Ini penting agar ujungnya swasta ikut berkontribusi mewujudkan pertumbuhan 8%.

Budi Sadikin berharap pemeriksaan kesehatan gratis dilakukan bagi setiap karyawan perusahaan anggota Kadin kemudian dilombakan.



Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N. Bakrie dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding memperlihatkan Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani pada acara Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama sekaligus Pengukuhan Pengurus Kadin Indonesia Masa Bakti 2024-2029, di JCC Jakarta, Jumat (13/3/2025). (Foto: Investortrust/Mohammad Defrizal)

2. MoU Kadin Indonesia dan Bapanas

MoU Bapanas dengan Kadin Indonesia bertujuan untuk memperkuat cadangan pangan yang ada di daerah. Menurut Sekretaris Bapanas Sarwo Edhy, melalui kerja sama ini, Kadin dan Bapanas akan membina usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terkait pangan yang bersumber dari karbohidrat. Komoditas pangan yang dikembangkan nantinya ditujukan untuk mengurangi ketergantungan pada beras.

Selain itu, kerja sama ini juga dimaksudkan untuk mengentaskan daerah rawan pangan. Saat ini, masih ada 62 kabupaten/kota di Indonesia yang masuk kategori rawan pangan.

Bapanas berencana mendirikan kios pangan di setiap desa untuk menjamin penyediaan makanan bergizi. Hal itu terkait dengan tugas Bapanas untuk menjamin ketersediaan 13 bahan pokok, termasuk menjaga stabilitas harga pangan.

3. MoU Kadin Indonesia dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)

Dalam MoU ini, Kadin akan berupaya penuh mengkonsolidasikan semua *stakeholder* penempatan PMI, meliputi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), Balai Latihan Kerja ke Luar Negeri (BLK LN), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dan Sarana Kesehatan (Sarkes).

Konsolidasi *stakeholder* penempatan PMI diwujudkan dalam satu sistem tata kelola rekrutmen calon PMI yang mengacu pada standarisasi dan sertifikasi internasional, mencakup pemetaan pasar kerja internasional, peningkatan kualitas pelatihan dan sertifikasi bertaraf internasional, dan pemeriksaan kesehatan dan psikologi yang memastikan calon PMI sehat secara jasmani dan rohani.

Dalam pelaksanaan pelindungan PMI selama bekerja, Kadin akan membangun sistem pendataan PMI

yang memudahkan pemerintah, baik KP2MI maupun Perwakilan RI, dalam pelaksanaan monitoring status dan keberadaan PMI di negara penempatan, melalui upaya diplomasi *chamber to chamber* serta kolaborasi dengan Diaspora Indonesia, *agency*, dan komunitas PMI di negara penempatan.

Kadin juga akan menyusun program pemberdayaan dan kewirausahaan bagi migran yang sudah kembali ke Tanah Air, agar mereka dapat memaksimalkan manfaat pengalaman sebagai pekerja migran sekaligus untuk mempertahankan level kesejahteraan mereka.

Selain berbagi pengalaman kepada calon PMI di pusat-pusat pelatihan, para mantan PMI bisa kembali menjadi pekerja migran di negara berbeda dengan pendapatan yang lebih tinggi dari sebelumnya.

Untuk memberikan pelindungan kepada PMI non-prosedural, khususnya yang bekerja di Arab Saudi dan Malaysia, Kadin



Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N. Bakrie dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memperlihatkan Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani pada acara Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama sekaligus Pengukuhan Pengurus Kadin Indonesia Masa Bakti 2024-2029, di JCC Jakarta, Jumat (13/3/2025). (Foto: Investortrust/Mohammad Defrizal)

mendukung rencana pemerintah untuk mengakhiri masa moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi dan melakukan pemutihan.

MoU Kadin Indonesia dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)

Untuk mengakselerasi program tiga juta rumah, Kementerian PKP menargetkan pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) akan rampung di semester II-2025. Pembentukan BP3 merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang Rumah Susun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja.

BP3 akan mencanangkan dana konversi dan hunian berimbang untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), memastikan penyaluran rumah bersubsidi tepat sasaran,

menyempurnakan ekosistem perumahan, hingga menjamin ketersediaan rumah (*housing stock*) bagi MBR.

4. MoU Kadin Indonesia dan Kementerian Koperasi

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Kementerian Koperasi menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait sinergi program untuk mewujudkan pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan, Kadin Indonesia siap mendukung rencana pembangunan 70 ribu Kopdes Merah Putih. Apalagi, koperasi merupakan salah satu pilar ekonomi, selain BUMN, swasta, dan UMKM. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, pembentukan 70 ribu Kopdes Merah Putih bertujuan untuk melindungi warga desa dari jebakan rentenir,

tengkulak, dan sistem ekonomi yang tidak adil. Dengan demikian, koperasi itu bisa menjadi instrumen untuk mengentaskan kemiskinan di perdesaan. Targetnya, kemiskinan ekstrem di perdesaan sebanyak 3 juta orang bisa dienyahkan.

Presiden Prabowo Subianto ingin koperasi menjadi gaya hidup baru, menjadi alat yang strategis, dan membantu rakyat meningkatkan kesejahteraan.

Koperasi yang dibentuk dengan anggaran dana desa akan menjadi penyalur bahan baku MBG di setiap desa. Koperasi-koperasi itu diharapkan akan menjadi pusat kegiatan ekonomi di setiap desa karena berperan menampung seluruh hasil pertanian di wilayah masing-masing.

Pembangunan setiap koperasi membutuhkan dana Rp 3-5 miliar, Rp 1 miliar di antaranya dari dana desa. Sisanya ditalangi dulu oleh Himbara yang pengembaliannya bisa dicicil dalam 3-5 tahun. ●

Sambutan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

saat Buka Puasa Bersama Kadin Indonesia bertajuk „Bersatu dalam
Kebaikan“ yang digelar di Jakarta Convention Center,
Jumat (14/3/2025).



Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan sambutan pada Pengukuhan Pengurus Kadin Indonesia Masa Bakti 2024-2029, di JCC Jakarta, Jumat (13/3/2025).
(Foto: Investortrust/Mohammad Defrizal)

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan, Rahayu-rahayu.

Yang saya hormati Pak Menko Bidang Perekonomian, para menteri Kabinet Merah Putih yang saya hormati, Ketua Umum Kadin, dan seluruh keluarga besar Kadin yang hadir pada sore hari ini.

Bapak Ibu yang saya hormati, Kadin ini memiliki peran yang sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga menjaga iklim investasi. Untuk itu saya berpesan pada Bapak Ibu semua, karena Bapak Ibu yang ada di depan saya ini adalah pengusaha-pengusaha andal, orang-orang hebat, saya titip pesan Bapak Ibu semua.

Satu, ini saya mohon Bapak Ibu untuk terus fokus pada industri-industri yang

padat karya dan berorientasi pada ekspor. Lalu saya juga pesan Bapak Ibu untuk selalu memberdayakan petani, nelayan dan juga UMKM.

Saya juga berpesan Bapak Ibu untuk terus mendukung kemajuan teknologi, dan juga yang paling penting mendukung hilirisasi industri. Pak Presiden dan saya tidak pernah bosan-bosan untuk membahas masalah hilirisasi, dengan hilirisasi kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Dengan hilirisasi kita bisa keluar dari *Middle Income Trap*, dengan hilirisasi kita juga bisa meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Tapi Bapak/Ibu ini tentunya dalam pelaksanaannya kita harus mengedepankan aspek sosial, aspek lingkungan dan juga aspek keberlanjutannya. Karena sekali lagi Bapak/ibu dampak dampak dari



(Atas) Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menjabat tangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pengukuhan Pengurus Kadin Indonesia Masa Bakti 2024-2029, di JCC Jakarta, Jumat (13/3/2025) (Foto: Dok. Kadin). (Bawah) Menteri Investasi dan CEO Danantara, Rosan Roeslani, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N. Bakrie, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebelum pembukaan acara Pengukuhan Pengurus Kadin Indonesia Masa Bakti 2024-2029, di JCC Jakarta, Jumat (13/3/2025) (Foto: Dok. Kadin).

perubahan iklim ini sudah ada di depan mata. Kekeringan, banjir, lalu kenaikan air laut, ini adalah ancaman yang nyata dan sudah di depan mata. Ini tolong ditampilkan foto-foto yang kemarin ada di Bekasi dan Sukabumi.

Bapak/ibu ini adalah kejadian di beberapa kota dalam beberapa minggu ini. Saya mohon Bapak/Ibu sekali lagi tantangannya di sini adalah mencari titik keseimbangan. Kita genjot hilirisasi, tapi juga harus wajib menjaga lingkungan kita genjot produksi pertanian tapi juga harus menjaga keseimbangan alam.

Ini sekali lagi gambar-gambar dan foto-foto yang ditampilkan tadi, saya juga ingin mengapresiasi kepala-kepala daerah, bupati, walikota, gubernur yang sudah aktif untuk menjaga lingkungannya. Ini terutama kemarin yang paling viral adalah Gubernur Jawa Barat yang sudah sangat berani melakukan gebrakan untuk menertibkan beberapa

bangunan-bangunan yang tidak sesuai regulasi.

Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk menutup pidato pada sore hari ini akan kita tutup dengan pantun.

Ini pantunnya khusus Mas Anin.

“Mas Anin punya kucing persia. Kucingnya lucu dan manja. Bersama Kadin Indonesia kita majukan ekonomi dan ciptakan lapangan kerja.”

Sekali lagi Bapak/ibu terima kasih. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Presiden Republik Indonesia mohon maaf, beliau belum bisa hadir pada sore hari ini. Dan Bapak Presiden menitipkan salam hangat untuk seluruh keluarga besar Kadin yang hadir pada sore hari ini.

Terima kasih.

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sambutan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie

saat Buka Puasa Bersama Kadin Indonesia bertajuk „Bersatu dalam Kebaikan“ yang digelar di Jakarta Convention Center, Jumat (14/3/2025).



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namu buddhaya, Salam kebajikan. Yang kami hormati dan cintai Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka.

Di sini hadir Bapak Menko Bidang Perekonomian, Bapak Menteri Agama KH Nasarudin Umar, Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunawan Sadikin, Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara dan juga Ketua Dewan kehormatan Kadin Indonesia Pak Rosan Roeslani.

Ada Menteri Perumahan dan Kawasan Pak Maruarar Sirait, Menteri Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Bapak Abdul Kadir Karding, Bapak Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, ada Kepala Badan Gizi Nasional, selamat datang Profesor Dadan Hindayana, dan juga wakil Badan Pangan Nasional. Hadir pula Ketua Umum MUI Pak KH Anwar Iskandar.

Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian saya ingin menyapa juga teman-teman dari Kadin daerah, ada 35 Kadin provinsi yang hadir di sini, dan ada 200 asosiasi dan himpunan, Dewan Kehormatan, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Penasihat, semua ada di sini.

Pak Wapres, pertama-tama judul dari pada acara ini adalah "Bersatu untuk Kebaikan". Alhamdulillah, tanggal 16 Januari yang lalu Pak Presiden Prabowo hadir di Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan, di mana saya terpilih jadi Ketua Umum dan di sini ada Pak Ketua Dewan Pertimbangan Bapak Arsjad Rasjid dan kita bersama-sama memastikan bahwa Kadin solid, teguh dan kompak. Karena tanpa persatuan sulit kita membuat kebaikan.

Tapi setelah persatuan tercapai kita bisa berlomba-lomba untuk membuat kebaikan tentunya.

Bapak-bapak ibu-ibu sekalian, amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 sangat jelas bahwa Kadin adalah dua hal. Pertama naungan dunia usaha, di sini kita mempunyai teman-teman dari Kadin provinsi, lalu juga mempunyai teman-teman dari asosiasi dan himpunan. Dan di dalam amanah undang-undang mengatakan bahwa di bawah Kadin termasuk BUMN, swasta, koperasi dan juga UMKM.

Dan yang kedua, Kadin adalah mitra strategis pemerintah, yang artinya hukumnya wajib kita mendampingi pemerintah.



Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N. Bakrie menyampaikan sekapur sirih pada acara Pengukuhan Pengurus Kadin Indonesia Masa Bakti 2024-2029, di JCC Jakarta, Jumat (13/3/2025) (Foto: Investortrust/Dicki Antariksa).

Nah di sini saya sampaikan, walaupun ada efisiensi di kementerian, menteri-menteri Bapak tetap produktif. Saya melihat sendiri bahwa tadi baru saja kita menandatangani beberapa MoU terkait empat *Quick Win* Kadin.

Yang pertama adalah mendukung program Makanan Bergizi Gratis. Kita sudah melaksanakan MoU dengan Menteri Pertanian dan juga dengan Badan Pangan Nasional, Menteri Koperasi juga kita tanda tangani MoU. Kita merasa niat dan tujuan program ini sangat baik, yaitu menyejahterakan masyarakat luas.

Jadi Kadin ingin berpartisipasi untuk membangun pilot project sebelum 17 Agustus 2025, supaya bisa ikut membuat SPPG atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi.

Quick Win kedua adalah PKG, Pemeriksaan Kesehatan Gratis. Di sini ada Pak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, terima kasih kesempatannya. Kami melihat bahwa ini adalah program yang sangat besar dan bisa melakukan deteksi dini kesehatan dan ujungnya bisa menghemat pembiayaan pengobatan, dan bisa justru membuat ekonomi lebih produktif. Jadi kita menandatangani bukan saja dari sisi PKG-nya tapi juga *blueprint*-nya.

Dan yang ketiga adalah program perumahan layak huni dan terjangkau. Kita sudah mulai dari

beberapa hari yang lalu, dan kita akan tingkatkan kesempatan ini dengan teman-teman Kadin Provinsi. Bahkan juga dengan teman-teman BUMN yang mempunyai lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan.

Quick Win keempat adalah program tenaga kerja migran. Kami merasa tenaga kerja migran ini adalah ekspatriat dan pahlawan devisa. Sehingga kita melihat ada satu setengah juta *backlog* yang masih bisa dilatih terutama suster, pelayan, dan ini kita lihat merupakan suatu hal yang kita ingin fokuskan dalam waktu singkat.

Kami sampaikan bahwa Kadin ikut pemerintah, kami tahu THR perlu diberikan lebih dulu. Dan juga kami di dalam bulan Ramadan ini berbagi dengan kaum dhuafa dan juga melaksanakan pasar murah di seluruh Indonesia.

Satu lagi saya ingin menyampaikan bahwa Danantara itu adalah ide yang bagus sesuai dengan visi Pak Prabowo, bahwa *Indonesia Incorporated* mungkin adalah gabungan antara Danantara dan Kadin.

Terima kasih sekali lagi untuk kedatangannya dan dukungannya. Kadin satu, Kadin kompak mendukung pemerintah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh



Penulis: **Mulya Amri, Ph.D,**
Kadin Indonesia Institute

Empat Program Quick Win Kadin dan Kontribusinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 8%

Presiden Prabowo telah mencanangkan target ambisius untuk menekan angka kemiskinan ekstrem hingga 0% serta mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun. Target ini bukan mustahil, mengingat beberapa negara seperti Tiongkok, India, dan Vietnam telah membuktikan bahwa kebijakan yang tepat dan sinergi antara pemerintah serta sektor swasta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat.

Tiongkok, misalnya, berhasil mengangkat ratusan juta orang dari kemiskinan ekstrem dalam tiga dekade terakhir melalui industrialisasi dan reformasi ekonomi. Sementara itu, Vietnam mencatat pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun dengan strategi investasi asing dan penguatan sektor manufaktur. Indonesia dapat mengikuti jejak negara-negara ini dengan mengoptimalkan potensi domestik serta mendorong kolaborasi lintas sektor.

Dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, Kadin Indonesia telah menginisiasi empat program Quick Win yang berlandaskan semangat „Indonesia Incorporated“ dan gotong royong. Keempat program ini dirancang untuk mendorong pembangunan berkelanjutan,



mengurangi kemiskinan ekstrem, serta meningkatkan investasi dan daya saing tenaga kerja Indonesia. Dengan implementasi yang tepat, program ini berpotensi menjadi katalisator dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun.

1. SPPG Gotong Royong: Memenuhi Kebutuhan Gizi Anak Sekolah

Kadin Indonesia bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) akan membangun dan mengoperasikan 19 pilot dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Program

ini ditargetkan mampu menjangkau sekitar 628 sekolah dan memberikan manfaat bagi 64.000 siswa/siswi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Kalimantan Selatan.

Program ini bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi UMKM melalui pelatihan tata kelola SPPG. Dengan investasi yang bersumber dari CSR anggota Kadin, program ini menjadi salah satu

bentuk nyata kolaborasi sektor swasta dalam mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam jangka panjang, peningkatan kualitas gizi akan berkontribusi terhadap produktivitas tenaga kerja yang lebih baik, yang menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi.

2. Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Gotong Royong

Kadin Indonesia, bersama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, berkomitmen untuk meningkatkan kualitas perumahan rakyat melalui program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Hingga 17 Agustus 2025, program ini menargetkan renovasi 500 unit rumah di lima provinsi prioritas, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, NTT, dan Bangka Belitung.

Selain itu, Kadin juga menggagas proyek superblok perumahan dan kawasan permukiman di lahan BUMN, dengan *pilot project* pertama di kawasan industri PT Krakatau Steel. Dengan perumahan yang lebih layak dan terjangkau, program ini diharapkan mampu mendorong urbanisasi yang lebih terencana, mengurangi *backlog* perumahan, serta meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

3. Pekerja Migran Gotong Royong: Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja

Salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja. Melalui program „Pekerja Migran Gotong Royong“, Kadin Indonesia berkolaborasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia akan mempercepat penyebaran informasi serta meningkatkan akses terhadap peluang kerja bagi tenaga kerja terampil di luar negeri.

Program ini mencakup integrasi sistem rekrutmen calon pekerja migran dengan sistem KP2MI, penyediaan fasilitas pemeriksaan kesehatan terpadu (PKG), serta pengintegrasian data MCU (*Medical Check-Up*) dengan aplikasi Satu Sehat. Dengan kebijakan yang

lebih terstruktur dan efisien, program ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil Indonesia yang terserap di pasar global, sehingga mampu meningkatkan remitansi dan kontribusi tenaga kerja migran terhadap perekonomian nasional.

4. Klinik Gotong Royong: Mendorong Akses Kesehatan yang Lebih Baik

Dalam sektor kesehatan, Kadin Indonesia turut berperan aktif dengan menggagas „Klinik Gotong Royong“ yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Program ini bertujuan untuk memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat dengan mendirikan fasilitas klinik yang terjangkau dan berkualitas.

Selain memberikan layanan kesehatan yang lebih baik, program ini juga mendukung inisiatif pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi. Dengan tenaga kerja yang lebih sehat dan produktif, output ekonomi dapat meningkat, sehingga memperkuat daya saing nasional dalam menarik investasi dan mendorong industri yang lebih kompetitif.

DAMPAK PROGRAM QUICK WIN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

Keempat program *Quick Win* Kadin Indonesia ini berkontribusi signifikan dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 8% per tahun melalui beberapa mekanisme berikut:

1. Peningkatan Kualitas SDM: Program SPPG memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup, yang berujung pada peningkatan kecerdasan dan produktivitas tenaga kerja masa depan. Contohnya, anak-anak dengan gizi yang lebih baik memiliki potensi lebih besar untuk berkembang menjadi tenaga kerja berdaya saing tinggi di sektor industri dan teknologi, yang akan berkontribusi pada peningkatan produktivitas nasional.
2. Investasi di Infrastruktur Sosial:

Renovasi RTLH dan pembangunan superblok perumahan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menciptakan efek pengganda di sektor konstruksi. Setiap pembangunan rumah melibatkan berbagai industri terkait seperti bahan bangunan, tenaga kerja konstruksi, dan perbankan, yang secara langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan konsumsi domestik.

3. Peningkatan Produktivitas dan Kesehatan Masyarakat: Klinik Gotong Royong membantu memastikan tenaga kerja memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik. Dengan tenaga kerja yang lebih sehat, tingkat absensi di tempat kerja berkurang, produktivitas meningkat, dan biaya kesehatan perusahaan menurun. Misalnya, sebuah perusahaan manufaktur yang memiliki pekerja sehat dapat meningkatkan output produksi hingga 10% per tahun.
4. Mendorong Kolaborasi Publik-Swasta: Program pekerja migran membuka peluang kerja bagi tenaga terampil Indonesia di luar negeri, meningkatkan devisa negara melalui remitansi. Sebagai contoh, dengan meningkatnya jumlah pekerja Indonesia di sektor keperawatan di Jepang dan Jerman, remitansi yang masuk ke Indonesia bisa mencapai miliaran dolar per tahun, yang kemudian berkontribusi terhadap peningkatan konsumsi domestik dan investasi di sektor produktif.

KESIMPULAN

Melalui empat program *Quick Win* ini, Kadin Indonesia berperan aktif sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan implementasi yang efektif dan dukungan penuh dari sektor swasta serta pemerintah, program ini dapat menjadi motor penggerak dalam mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun, sekaligus mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju di masa depan. ●



HARAPAN

PADA KADIN INDONESIA

● Menteri Koperasi **Budi Arie Setiadi**

“Bersama Kadin Indonesia Sejahterakan Indonesia Lewat Pembentukan Koperasi Desa”

Ide pembentukan Koperasi Desa Merah Putih untuk melindungi masyarakat khususnya masyarakat desa, supaya tidak terjerat rentenir, tengkulak, dan sistem ekonomi yang tidak adil di desa. Kopdes Merah Putih ini menjadi tanda bukti bahwa Pak Presiden Prabowo ini betul-betul berkomitmen menyejahterakan rakyat dan memajukan desa di seluruh Indonesia.

Karena itu kerja sama dengan Kadin pasti kita butuhkan. Karena kalau 70 ribu Kopdes dibentuk berarti kalau kali tiga orang pengelolanya, berarti ada 210.000 orang yang harus kita latih yang harus kita bina. Koperasi sebagai kegiatan ekonomi konstitusi ini harus kita dukung, karena koperasi itu wujud dari demokrasi ekonomi dan juga cara saling menyejahterakan dan bisa mengangkat ekonomi rakyat dari kemiskinan.

Karena salah satu tugas kopdes ini juga mengentaskan kemiskinan ekstrem yang jumlahnya 3 juta orang di desa-desa. ●





- Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas)
Dr Sarwo Edhy

“Bapanas Butuh Bantuan Kadin Indonesia Perkuat Cadangan Pangan”

Tugas yang pertama Bapanas adalah memastikan ketersediaan pangan di seluruh Indonesia. Sehingga kami berharap kepada seluruh anggota Kadin Indonesia ikut memperkuat cadangan pangan di daerah. Kami juga membina UMKM yang terkait dengan industri pangan, yang bersumber dari karbohidrat. Seperti kita tahu Indonesia mempunyai lebih kurang 76 komoditas yang bersumber dari karbohidrat yang harus diupayakan menjadi pangan alternatif pengganti beras.

Kemudian ada program pengentasan daerah-daerah rawan pangan. Kita masih memiliki sekitar 62 kabupaten/kota yang termasuk kategori rawan pangan. Ini tugas kita bersama untuk menyelesaikannya secara bertahap, sekaligus memastikan menjamin ketersediaan bahan pangan yang beredar di masyarakat. Badan pangan bertugas menjamin ketersediaan 13 bahan pokok penting baik di pusat maupun daerah.

Kemudian Badan Pangan Nasional juga menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dengan melakukan beberapa kegiatan seperti gerakan pasar murah, dan secara bertahap mendirikan kios-kios pangan yang akan dibangun di setiap desa yang pada akhirnya akan menjadi penyedia bahan Makanan Bergizi Gratis. ●

- Menteri Kesehatan
Budi Gunadi Sadikin

“Akan Ajak Kadin Indonesia Lombakan Tingkat Kesehatan Tiap Perusahaan Anggota”

Tugas Menteri Kesehatan adalah menjaga masyarakat selalu sehat, tak hanya mengobati pada saat sakit. Gimana caranya supaya sehat Bapak Ibu harus rajin cek kesehatan. Kalau orang sakit yang paling banyak itu stroke, jantung, cancer, ginjal. Dan untuk mencegahnya dibutuhkan langkah pemeriksaan dini. Perlu diperiksa secara rutin setidaknya tekanan darah, gula darah dan tingkat kolesterol.

Saya titip ke Pak Anindya, setiap anggota Kadin diberikan lomba karena sudah ada fasilitas cek kesehatan gratis. Kalau sampai ada anggota Kadin yang karyawan-karyawati, atau keluarganya meninggal sebelum dia pensiun, akan diberi penilaian merah. Kenapa? Kalau pengusaha urus kesehatan karyawan-karyawatnya, seharusnya nggak ada yang meninggal sebelum usai pensiun.

Jadi nanti semua karyawan-karyawati perusahaan di bawah Kadin kita *screening*, kemudian kita lombakan perusahaan mana yang semuanya sehat. Mana yang karyawan-karyawatnya enggak pernah masuk rumah sakit, tidak ada yang wafat sebelum pensiun.

Kalau itu terjadi, Menteri Kesehatannya senang karena tugasnya menjaga masyarakat sehat itu tercapai. ●





- Kepala Badan Gizi Nasional
Prof Dadan Hindayana

“Dibutuhkan Peran Kadin Ikut Membangun Infrastruktur SPPG”

Penduduk Indonesia masih akan tumbuh menjadi 324 juta di tahun 2045, dan perlu diketahui sumber pertumbuhan itu dari keluarga yang dalam kategori miskin dan rentan miskin, dengan anggota keluarganya rata-rata 4,78. Artinya kalau ada 100 orang keluarga miskin, maka 78 keluarga memiliki anak tiga, dan 22 keluarga memiliki dua anak.

Kita lihat komposisi di lapangan 60% anak-anak tersebut sampai sekarang tidak pernah mendapatkan menu gizi seimbang dan 60% tersebut juga adalah mereka yang tidak pernah minum susu, kecuali susu ibunya karena tidak mampu. Oleh sebab itu program Makan Bergizi Gratis akan mencapai target 82,9 juta menyangkut ibu hamil, ibu menyusui, anak balita kemudian anak PAUD sampai SMA. Karena mereka yang sekarang ada di SD, SMP, SMA itu 20 tahun kemudian adalah tenaga kerja produktif. Kalau kita tidak intervensi, mereka akan menjadi tenaga kerja produktif dengan kualitas yang rendah, karena secara fisik tidak tumbuh optimal secara kecerdasan karena *stunting*.

Berikutnya untuk pengembangan infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) inilah yang membutuhkan kerja sama dengan semua pihak, dari mulai Kementerian, Pemda, TNI-Polri, Muhammadiyah-NU, kemudian koperasi. Tentu saja kami mengundang juga keterlibatan Kadin Indonesia, yang bisa membantu percepatan infrastruktur kita karena sekarang baru bisa membangun 1.100 SPPG. Sedangkan kami butuh 30.000. Jadi kalau Kadin bisa membangun itu akan bagus sekali, sehingga ada dua peran yang bisa diperankan Kadin, pertama sebagai mitra BGN dalam membangun infrastruktur, yang kedua membina rantai pasok. Kami mohon agar para pengurus Kadin dari seluruh Indonesia bisa turut serta mensukseskan program Makan Bergizi Gratis dan Insyaallah dengan keterlibatan Kadin di seluruh Indonesia program ini akan lancar. ●



- Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Abdul Kadir Karding

“Kesempatan Kadin Indonesia Membela Orang yang Sedang Mencari Pekerjaan”

Satu momentum yang bersejarah, kami bisa menandatangani nota kesepahaman dengan Kadin Indonesia. Mungkin selama ini Ketum Kadin tidak terlalu terlibat terhadap isu pekerja migran. Tapi alhamdulillah saya bertemu beliau di Madinah, saya coba sedikit menjelaskan. Saya selaku menteri baru diberi mandat oleh Presiden Prabowo, yang pertama mengurangi pekerja migran yang mengalami kekerasan, eksploitasi, sekaligus juga *human trafficking*. Kedua, tempatkan pekerja migran Indonesia yang berkualitas untuk meningkatkan devisa.

Isu kita hari ini adalah banyaknya pengangguran, banyaknya PHK. Saya kira ini kesempatan Kadin Indonesia masuk ke hal-hal membela orang yang sedang mencari pekerjaan dan cari makan. Yang kedua kami berharap potensi yang dimiliki oleh Kadin Indonesia juga mampu membantu pekerja migran kita dalam hal pemberdayaan. Karena tugas kami berdasarkan undang-undang yaitu melindungi pekerja migran Indonesia dari sisi sosial hukum dan ekonomi dari sebelum ditempatkan dan pada saat ditempatkan, dan setelah dia purna.

Nah pekerja migran purna ini butuh pendampingan usaha, butuh akses modal, butuh integrasi atau reintegrasi. Mudah-mudahan Kadin bisa mengambil peluang-peluang ini baik di pelatihan, penempatan maupun pemberdayaan. ●